

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Agung Perkasa

NPP. 29.1631

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: agungperkasa69@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: Landslides are a disaster that occurs every year in Ambon City causing casualties and substantial losses. Based on the high potential for landslides in Ambon City, it is necessary for local government efforts to reduce disaster risk, one of which is the pre-disaster stage, namely disaster mitigation. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Regional Disaster Management Agency in mitigating landslides in Ambon City, as well as inhibiting and supporting factors, as well as efforts to overcome obstacles to landslide disaster mitigation. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were obtained through interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is data reduction, presentation and conclusion drawing.

Result: The results of this study indicate that the role of the Regional Disaster Management Agency in mitigating landslides in Ambon City has been running but is still not optimal.

Conclusion: Mitigating landslides in Ambon City has been running but is still not optimal. Factors that hinder the mitigation of this landslide disaster include the Covid-19 Pandemic, inadequate human resources and infrastructure both in quality and quantity as well as dense population settlements plus a lack of public awareness to protect the environment. Efforts to overcome obstacles include coordinating selecting the most needed mitigation activities and approaching the community as well as training to improve employee competence.

Keywords: The role of BPBD Ambon City, Mitigation, Landslide

ABSTRAK

Latar Belakang: Tanah longsor menjadi bencana yang tiap tahun terjadi di Kota Ambon menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian cukup besar. Berdasarkan tingginya potensi bencana tanah longsor di Kota Ambon, maka perlu adanya upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana salah satunya tahap pra bencana yaitu mitigasi bencana. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi tanah longsor di Kota Ambon, juga faktor penghambat dan pendukung, serta upaya mengatasi hambatan mitigasi bencana tanah longsor. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kota Ambon sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. **Kesimpulan:** Mitigasi bencana tanah longsor oleh BPBD sudah berjalan baik namun belum optimal. Faktor yang menghambat mitigasi bencana tanah longsor ini antara lain adanya Pandemi Covid-19, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas serta pemukiman penduduk yang padat ditambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan koordinasi memilih kegiatan mitigasi yang paling dibutuhkan dan pendekatan dengan masyarakat serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Kata Kunci: *Peran BPBD Kota Ambon, Mitigasi, Tanah Longsor*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia karena memiliki iklim tropis yaitu musim panas dan hujan dengan tanda perubahan suhu, arah angin dan cuaca yang ekstrem. Tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang tahun 2020, Terjadi 2.929 bencana alam dimana tanah longsor menjadi urutan ke tiga bencana alam yang sering terjadi dengan total 537 kejadian tanah longsor (BNPB, 2020). Kota Ambon adalah ibukota Provinsi Maluku merupakan kota yang paling memiliki peranan penting di Provinsi Maluku, karena sebagai pusat pemerintahan dan juga sebagai pusat pembangunan infrastruktur serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi topografi Kota Ambon yaitu 73% wilayah daratan yang dapat dikelompokkan dalam wilayah berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sedangkan 17% dapat dikelompokkan daratan yang datar atau landai dengan kemiringannya kurang dari 20%. Dengan melihat topografi Kota Ambon, jadi dapat dikatakan sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri dari bukit dan lereng terjal. Hal tersebut mengakibatkan Kota Ambon sebagai salah satu daerah dengan potensi tinggi terjadi tanah longsor. Melihat kondisi Kota Ambon yang berpotensi bencana tanah longsor, maka pemerintah daerah Kota Ambon membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bertugas menanggulangi bencana secara terencana dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Ambon.

Kota Ambon terdiri dari 347.288 Penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan kebutuhan untuk tempat tinggal semakin meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat dan permukiman yang relatif aman terbatas, memaksa manusia untuk memperluas ke daerah yang lain yang mungkin rentan terhadap bencana khususnya tanah longsor. Tanah longsor terjadi bukan hanya karena terdapat gangguan kestabilan massa tanah, tetapi karena komposisi tebing yang sudah tidak aman lagi akibat dampak dari aktivitas warga sekitar seperti membuang sampah sembarangan. Tanah longsor menjadi bencana yang tiap tahun terjadi di Kota Ambon menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian cukup besar. Walaupun sudah ada tindakan penanggulangan dari pemerintah seperti pendekatan dan pemberdayaan masyarakat serta membangun sistem peringatan dini, hanya saja hal tersebut masih belum dapat di optimalkan, karena adanya kendala-kendala yang sulit diprediksi seperti kekurangan alat kebencanaan maupun kurangnya sosialisasi yang menjadi penghambat dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan upaya dalam mitigasi bencana karena akibat dari bencana dapat diperkirakan, tetapi waktu terjadinya bencana tidak bisa dipastikan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Ambon merupakan salah satu kota yang rawan terhadap bencana tanah longsor karena memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri atas daerah perbukitan dan berlereng. Kondisi topografi Kota Ambon yaitu 73% wilayah daratan yang dapat dikelompokkan dalam wilayah berbukit hingga berlereng terjal dengan kemiringan diatas 20%, sedangkan 17% dapat dikelompokkan daratan yang datar atau landai dengan kemiringannya kurang dari 20%. Adanya pertumbuhan penduduk yang pasti terjadi menunjukkan kebutuhan untuk tempat tinggal semakin meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat dan permukiman yang relatif aman terbatas, memaksa manusia untuk memperluas ke daerah yang lain yang mungkin rentan terhadap bencana khususnya tanah longsor. Tanah longsor terjadi bukan hanya karena terdapat gangguan kestabilan massa tanah, tetapi karena komposisi tebing yang sudah tidak aman lagi akibat dampak dari aktivitas warga sekitar seperti membuang sampah sembarangan. Semakin banyak manusia yang tinggal di daerah yang berlereng maka semakin luas jangkauan mitigasi yang harus dilakukan oleh BPBD dan membutuhkan ketersediaan anggaran dan sumber daya hingga sarana prasarana yang memadai namun keterbatasan masih sulit ditanggulangi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapatkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun konteks bencana tanah longsor. Penelitian Bahtiar berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai (Bahtiar, 2018). Penelitian ini menyampaikan bahwa peran BPBD Kabupaten Sinjai dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor bisa diklasifikasikan baik, Hal itu dapat dilihat dari pendapat masyarakat korban bencana tanah longsor yang merasakan sendiri progam pemerintah terkait prinsip penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah, begitu juga kerja sama BPBD dengan masyarakat yang sangat kompak dalam persiapan dan penanganan bencana tanah longsor. Penelitian Aurellia Chintia Deby, Yakub Cikusin & Roni Pridahanto (2018) memperoleh hasil yaitu menunjukkan formasi yang diambil BPBD Kota Batu dalam menanggulangi bencana sudah begitu baik salah satunya dengan pembentukan desa tangguh bencana tetapi belum maksimal dikarenakan adanya kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian. Sehingga dari penelitian yang dilakukan tersebut peneliti memberi masukan agar adanya pelatihan kepada masyarakat maupun lembaga terkait dan keterbukaan informasi sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik (Aurellia Chintia Deby dkk., 2018). Penelitian Sugipto Beong, Erwin Resmawan & Rita Kalinggi (2018) yang menunjukkan peran BPBD Kota Samarinda yang sudah berjalan cukup optimal. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta sosialisasi kebencanaan dilakukan dengan fungsi koordinasi yaitu kerjasama bersama TNI, POLRI dan dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda. Pelaksanaan tanggap darurat yaitu turun langsung dalam aksi penyelamatan dan evakuasi dengan membentuk tim komando yang berkolaborasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Penelitian Furqon Hasani (2016) menyimpulkan bahwa dalam program mitigasi oleh BPBD terdapat dua jenis mitigasi yaitu Mitigasi Struktural yaitu melakukan pembangunan fisik seperti pemasangan alat peringatan dini, pembuatan tanggul, shelter dan jalur evakuasi. Mitigasi Non-Struktural BPBD melakukan sosialisasi dan simulasi dan penguatan kapasitas kepada masyarakat serta pembuatan Perda penanggulangan bencana dan kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada lokus dan juduk penelitian yang penulis lakukan yaitu mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota ambon. Teori yang penulis gunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni pendapat menurut jones dalam mahsun (2006) yang mengemukakan organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama yaitu *Regulatory role* (Peran regulatif), *Enabling role* (Peran peningkatan kemampuan) dan *Direct role* (Peran langsung).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara spesifik melalui data primer maupun sekunder yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara sistematis dengan menyiapkan pedoman wawancara terhadap 8 orang informan yang terdiri dari kepala pelaksana BPBD, sekretaris BPBD, kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD, kasi pencegahan BPBD, staf pusdalops, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana tanah longsor sebanyak 3 orang). Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh jones dalam mahsun (2006) yaitu peran organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama yakni *Regulatory role* (peran regulatif), *Enabling role* (peran peningkatan kemampuan), dan *Direct role* (peran langsung).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon menggunakan teori dari jones dalam mahsun (2006) yang mengemukakan bahwa organisasi publik memiliki tiga peran utama yaitu *Regulatory role* (peran regulatif), *Enabling role* (peran peningkatan kemampuan) dan *Direct role* (peran langsung). Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 *Regulatory role* (Peran regulatif)

Masyarakat membutuhkan regulasi agar dapat merasakan layanan publik secara merata, diantaranya pelayanan publik di bidang kebencanaan. Tanpa adanya aturan maka kesenjangan akan terjadi, kemudian dapat mengakibatkan kerugian di berbagai pihak. Peran regulatif yakni:

1. Visi misi dan kebijakan

Visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon diambil dari visi misi Kota Ambon yang disusun oleh Walikota Kota Ambon terpilih dan kebijakan yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon diambil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Ambon yang berpedoman dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. BPBD Kota Ambon Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Telah ada regulasi yang dibuat oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon ialah berupa himbauan-himbauan yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas PUPR dan dinas lingkungan hidup seperti spanduk dan larangan membuang sampah di lereng atau larangan membangun bangunan di daerah curam serta juga simbol-simbol bahaya yang dipasang di lokasi rawan bencana tanah longsor. Selain itu, BPBD juga menghimbau secara langsung dengan melakukan komunikasi ke setiap Ketua RW di daerah rawan bencana tanah longsor untuk dapat menertibkan warganya yang melanggar himbauan-himbauan tersebut. Kurang efektifnya himbauan tersebut dikarenakan minimnya pengawasan dan belum adanya sanksi khusus yang diberlakukan serta spanduk dan simbol bahaya yang dipasang juga masih kurang.

3.2 Enabling role (Peran peningkatan kemampuan)

Peran peningkatan kemampuan disini yaitu memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan untuk masyarakat terhadap bencana khususnya tanah longsor melalui mitigasi baik secara fisik maupun non fisik. Untuk melaksanakan peran tersebut secara maksimal, maka diperlukan ketersediaan sumber daya, sarana & prasarana serta anggaran yang memadai.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia harus diperhatikan pengelolaannya. Ketidaktepatan dalam penyediaan sumber daya manusia akan mengakibatkan penyelesaian pekerjaan yang kurang efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan hal yang harus diutamakan dalam mendukung sasaran dan capaian organisasi dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon memiliki jumlah pegawai sebanyak 37 orang yang diantaranya 26 orang pegawai negeri sipil, 1 orang pegawai kontrak, dan 10 orang pusdalops/tenaga harian lepas. Dilihat dari kondisi Kota Ambon yang sering terjadi bencana jumlah pegawai dirasa masih belum cukup. Belum lagi, dari sumber daya manusia yang tersedia sebagian besar tidak berlatar belakang bidang kebencanaan mengakibatkan adanya kekurangan dalam peningkatan kualitas pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya pendidikan kebencanaan yang mempengaruhi produktivitas kerja dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon telah memahami manajemen penanggulangan bencana walaupun bukan berlatar belakang pendidikan kebencanaan karena telah mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai kebencanaan. Selanjutnya, Pemanfaatan tenaga bantuan yang berasal dari masyarakat melalui edukasi kebencanaan memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat maupun penunjang yang digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sejauh ini mengenai sarana dan prasarana BPBD Kota Ambon masih terus berbenah untuk meningkatkan ketersediaannya. Untuk fasilitas di kantor dan fasilitas pegawai dirasa cukup walaupun masih ada kekurangan tetapi tidak mengurangi semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Mengenai alat-alat kebencanaan kami sudah memiliki Warning Receiver System (WRS) atau alat monitor gempa tsunami dan Early Warning Sistem (EWS) atau alat peringatan dini untuk tanah longsor yang dipasang di batu gajah serta di setiap lokasi rawan bencana sudah terpasang rambu-rambu evakuasi. Pemeliharaan sarana dan prasarana selalu diadakan tiap tahun namun adanya *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 sehingga anggaran tersebut menjadi sangat berkurang. Hal tersebut mengakibatkan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belum memudahinya sarana dan

prasarana dapat dilihat dari adanya beberapa peralatan kebencanaan yang belum lengkap dan mengalami kerusakan hingga belum adanya media informasi resmi oleh BPBD Kota Ambon.

3. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran berperan dalam perencanaan, yaitu berupa rangkaian rencana keuangan tertulis organisasi untuk kedepannya. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan arah kebijakan yang akan dibuat. Sumber anggaran BPBD Kota Ambon diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan tiap tahunnya sesuai yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan anggaran BPBD Kota Ambon tiap tahunnya mengalami kenaikan, Namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami keterbatasan anggaran karena adanya refocusing anggaran dalam hal penanganan covid-19. Adanya refocusing anggaran cukup menghambat, akibatnya ada beberapa rencana kegiatan manajemen bencana khususnya mitigasi bencana yang tidak dapat terlaksanakan.

3.3 Direct role (peran langsung)

Peran langsung adalah aksi nyata yang dilakukan dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon. Peran langsung merupakan poin terpenting dalam menjalankan peran karena sebagai bentuk penilaian sejauh mana progres yang telah dilaksanakan.

1. Upaya mitigasi bencana tanah longsor

Tanah longsor merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di Kota Ambon. Pentingnya pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana tanah longsor sebagai upaya mengurangi dampak dari kejadian tanah longsor di Kota Ambon. Kegiatan mitigasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Kegiatan mitigasi struktural yang dilakukan yaitu, BPBD Kota Ambon talud dan turap penahan tanah yang terbuat dari batu kali dan diperkuat dengan campuran semen yang berguna untuk menjaga kestabilan tanah di kawasan lereng. Karena keterbatasan anggaran BPBD hanya membuat talud dan turap di daerah strategis seperti kawasan lereng yang banyak dilalui dan di tempati masyarakat. Selanjutnya, BPBD juga membuat biopori lubang resapan air yang terbuat dari selinder dan di isi dengan sampah organik. Biopori berguna agar meresap air hujan ke dalam tanah dan dapat mencegah tanah longsor yang terjadi karena aliran air di kawasan lereng. Biopori tersebut kami buat bersama masyarakat di daerah kawasan rawan longsor. Selain membuat talud, turap dan biopori BPBD juga memasang tarpal pada beberapa kawasan lereng yang berpotensi tanah longsor seperti di ahuru, batumerah, dan gunung malintang. Tarpal tersebut efektif menutup lereng sehingga aliran air saat hujan tidak mengikis tanah yang dapat mengakibatkan tanah longsor. BPBD memasang 1 set Early Warning System atau alat peringatan dini untuk mendeteksi, memantau, dan memberi peringatan dini tanah longsor. Kegiatan mitigasi non struktural tanah longsor di Kota Ambon sangat aktif dilaksanakan. Kegiatan mitigasi tersebut yaitu pelatihan siaga bencana kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana longsor agar terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kemudian masih banyak lagi mitigasi non struktural bencana tanah longsor yang dilakukan seperti membuat desa tangguh bencana, sosialisasi tanah longsor yaitu peduli terhadap lingkungan, sekolah aman bencana, rambu jalur evakuasi, pembentukan organisasi siaga bencana, dan lain-lain.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan rangkaian kerja sama antara badan, instansi, unit hingga masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan tertentu agar dapat saling membantu, mengisi dan melengkapi sehingga tujuan bersama bisa terselesaikan dengan sempurna. Pentingnya koordinasi agar tidak terjadi kekosongan dan kesamaan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi bertabrakan. koordinasi secara internal dilaksanakan sebagai upaya penyatuan konsepsi agar

kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon termasuk mitigasi bencana tanah longsor dapat terlaksana secara terintegrasi. BPBD melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor berkoordinasi dengan beberapa instansi atau dinas terkait. Koordinasi tersebut salah satunya berkoordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan seperti dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan talud atau pengaturan mengenai pembangunan gedung dan rumah di daerah rawan bencana longsor. BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial yaitu TAGANA dalam melakukan pelatihan tanggap bencana dan penguatan kapasitas kepada masyarakat yang selalu kami laksanakan. Untuk lingkup masyarakat BPBD berkoordinasi dengan relawan yang dibentuk dan dilatih sebagai perbantuan kami di lapangan

3. Sosialisasi

Sosialisasi dalam kebencanaan merupakan bentuk kegiatan pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat agar dapat memahami manajemen bencana melalui penanaman, pengedukasian maupun pelatihan mengenai bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai upaya mitigasi bencana karena sosialisasi sangat efektif untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Sosialisasi juga bisa membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan BPBD Kota Ambon. Sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Ambon dilaksanakan tiap tahunnya. Sosialisasi tersebut masuk ke dalam rangkaian acara peringatan hari kesiapsiagaan dan hari pengurangan risiko bencana. Selain acara peringatan ada juga kegiatan sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor yang masuk ke dalam program BPBD Kota Ambon yaitu sekolah tangguh bencana. Namun dalam dua tahun terakhir sosialisasi tidak dilaksanakan karena pembatasan sosial dan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi covid. Namun Adanya pandemi covid tidak seluruhnya membatasi kegiatan sosialisasi. Sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor tetap dilakukan biasanya saat musim hujan melalui media informasi seperti di koran, iklan, dan juga di media sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus waspada saat musim hujan yang bisa saja menyebabkan bencana tanah longsor.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dalam mitigasi bencana tanah longsor memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah rawan longsor, dimana masyarakat telah memahami langkah-langkah penanganan bencana tanah longsor melalui edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan. Sama halnya dengan penelitian Bahtiar (Bahtiar, 2018) dimana peran pemerintah atau program instansi terkait sangat menentukan tingkat kekompakan pemerintah dengan masyarakat dalam bekerjasama menangani bencana tanah longsor. Semakin solidnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka semakin maksimal pula dampak positif mitigasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Ambon masih mengalami banyak keterbatasan mengakibatkan kegiatan mitigasi masih belum bisa optimal. Kurangnya pengawasan oleh BPBD Kota Ambon mengakibatkan kegiatan mitigasi seperti pembentukan komunitas siaga dan desa tangguh bencana serta himbuan yang telah dibuat tidak berjalan seperti yang diharapkan seperti yang ditulis Aurellia Chintia, (Aurellia dkk, 2018) pada penelitian yang mereka lakukan.

Pentingnya pengembangan dan perluasan fungsi koordinasi yaitu kerjasama dengan instansi terkait maupun masyarakat agar dalam pelaksanaan mitigasi bencana dapat menjangkau dan menambah lebih banyak sumber daya sehingga hasil pelaksanaan mitigasi dapat lebih maksimal, layaknya temuan Sugipto Beong dkk, (Sugipto Beong dkk, 2018). Pembangunan talud, biopori, dan tarpal pada area lereng serta rambu evakuasi maupun alat peringatan dini merupakan mitigasi dalam

bentuk fisik yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon dirasa sangat dapat mengurangi jumlah hingga dampak dari bencana tanah longsor menjadikan masyarakat lebih merasa aman ketika melakukan aktifitas di kawasan berlereng. Mitigasi struktural pun juga tidak luput dari program mitigasi bencana tahunan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya baik melalui sosialisasi yang berisi edukasi secara langsung maupun melalui media elektronik hingga pemberian pelatihan-pelatihan kebencanaan kepada masyarakat, layaknya penelitian Furqon Hasani (Furqon Hasani, 2016).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan program mitigasi dalam bentuk fisik maupun non fisik. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan antara lain disebabkan karena kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap program mitigasi fisik yang telah dibuat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang membuang sampah dan membangun di kawasan lereng yang curam. Belum lagi adanya keterbatasan-keterbatasan dan semakin luasnya permukiman di kawasan berlereng yang mengakibatkan BPBD Kota Ambon menjadi lebih sulit. Guna memperluas jangkauan dan menambah sumber daya, disarankan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat. BPBD juga harus mampu mengembangkan koordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak instansi terkait maupun masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya ketika melaksanakan penelitian dilapangan. Penelitian ini juga mengalami keterbatasan data dikarenakan database yang terbaru masih dirancang.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari penelitian ini masih temuan awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon untuk menemukan hasil yang lebih luas dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada seluruh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga lembaga tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu dan keterampilan yang telah penulis dapatkan serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, R. P. W. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang*, 13(3), 34–41.
- Creswell J. W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BPS.go.id (Badan Pusat Statistik Dalam Angka Kota Ambon 2021) Diakses Rabu, 2 Februari 2022
- <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>. BAB 6 DOCRPIJM Profil Kota Ambon. Diakses Sabtu, 28 Agustus 2021
- Mahsun, M., Jones (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugipto beong, erwin resmawan, rita kalinggi. (2015). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4).
- Skripsi Bahri (2018) Peran BPBD dalam menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten sinjai. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/391-Full_Text.pdf
- Skripsi Furqon Hasani (2016) Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana alam. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15677/>.

